

PROGRAM KERJA TAHUN 2018



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Program Kerja ini merupakan pedoman bagi seluruh kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2018, yang akan diuraikan dalam tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang pada setiap unit kerja Bidang, Sekretariat, UPT dan Cabang Dinas, baik dalam bentuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan serta peraturan dan kebijakan Pendidikan Nasional yang melandasi kegiatan operasional baik dari Pusat maupun dari Propinsi.

Sebagai bahan pertimbangan bahwa Program Kerja ini menggambarkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai program yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang diwujudkan dalam kegiatan dan program tahun anggaran 2018.

Semoga Program Kerja ini dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan dapat memberikan nilai tambah serta mendorong aktivitas kerja yang positif.

Surabaya, 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, MPd

Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB.	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Mekanisme Pelaksanaan Program Kerja	4
II. POKOK - POKOK KEBIJAKAN	6
A. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	6
B. Strategi dan Kebijakan Pendidikan Provinsi Jawa Timur	12
III. PROGRAM KERJA TAHUN 2018	16
IV. PENUTUP	36
LAMPIRAN	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pendidikan, pada hakekatnya merupakan proses pembangunan sosial ekonomi dan budaya untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera lahir maupun batin. Meningkatnya mutu pendidikan akan memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan. Meningkatnya pembangunan pendidikan juga berarti meningkatkan kemampuan komunikasi antar penduduk, antar suku, antar pulau, dan antar negara.

Pembangunan pendidikan juga akan meningkatkan proses pembangunan ekonomi masyarakat dan memantapkan langkah kita dalam memasuki tahap industrialisasi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat lebih tinggi lagi.

Sejalan dengan pentingnya peran perencanaan pembangunan pendidikan yang terencana dan sistematis, serta atas dasar pemikiran bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang berjangka panjang, maka perencanaan pembangunan bidang pendidikan disusun dalam bentuk perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek/tahunan/Program Kerja. Perencanaan jangka pendek/tahunan atau Program Kerja sangat penting peranannya dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan dinas/ instansi karena sebagai acuan kegiatan dari masing - masing Bagian/Bidang/UPT dan Cabang Dinas lebih jauh menjadi tolok ukur kinerja dari penyelenggara program/kegiatan yang berkesinambungan di lingkungan dinas/instansi tersebut.

Dalam proses penyusunan Program Kerja Tahun 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selain itu penyusunan Program Kerja Tahun 2018 juga mempertimbangkan :

1. Gambaran umum pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
2. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
3. Kesenambungan program/kegiatan.
4. Isu - isu dan permasalahan pendidikan yang faktual.

Dengan memperhitungkan faktor pendukung serta penghambatnya, diharapkan Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dapat dipergunakan sebagai pedoman yang akurat dan realistis dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini disusun dalam rangka mengimplementasikan program-program yang telah disusun dan diprogram dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan serta dilandasi kebijakan dan ketentuan lainnya.

Oleh karena itu Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mengakomodir rencana program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu dapat juga sebagai pembanding sejauh mana perencanaan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi program/kegiatan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 didasarkan pada :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2017, tanggal : 3 Mei 2017, terkait Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019
15. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Penyusunan Program Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

- a. Program/kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
- b. Pelaksanaan kegiatan/program masing - masing Bagian/Bidang/UPT dan Cabang Dinas dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Program Kerja ini adalah :

- a. Agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih terkendali, efektif dan efisien.
- b. Dapat memberikan peran dan fungsi pada setiap Bagian/Bidang/UPT dan Cabang Dinas dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
- c. Sebagai indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap target dan hasil yang akan dicapai.
- d. Untuk memberi masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan di masa mendatang.

D. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Mekanisme pelaksanaan Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 didasarkan pada :

1. Program Kerja ini disusun berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta kebijakan pendidikan lainnya.
2. Program Kerja ini untuk dipahami dan dipedomani sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dari masing - masing Bagian/Bidang/UPT

dan Cabang Dinas dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

3. Masing - masing Bagian/Bidang/UPT dan Cabang Dinas dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyusun persiapan rencana kegiatan, selanjutnya digunakan untuk menyusun kegiatan dalam DPA.
4. Dalam pelaksanaan DPA diikuti pemantauan hasil kegiatan program/kegiatan.
5. Setelah pelaksanaan program/kegiatan diadakan evaluasi dan pelaporan mengenai permasalahan dan kendala beserta cara pemecahannya.

BAB II

POKOK - POKOK KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR

A. KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam menyusun Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini selalu berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan khususnya bidang pendidikan, yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Sehingga penyusunan Program Kerja ini tidak boleh bertentangan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Program Kerja ini adalah :

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2017, tanggal : 3 Mei 2017, terkait Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.**
- 2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.**

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan Tahun 2014-2019

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal Pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya dalam ayat (2) pada pasal yang sama disebutkan bawah Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Pembangunan, dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Merujuk pada klausul dalam Undang-Undang dimaksud maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak menetapkan visi dan misi organisasi tersendiri tetapi menjadi bagian dari perangkat daerah yang mengemban visi dan misi Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mengembann visi Provinsi Jawa Timur Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 yakni :

**“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**

Maka, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari komponen utama Pemerintahan Daerah mengembann salah satu misi pembangunan Provinsi Jawa Timur yakni misi pertama :

“Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan”

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan misi pembangunan Jawa Timur yang menjadi amanat dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dimaksud maka ditetapkan **tujuan pendidikan Jawa Timur** yakni :

“Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, kapasitas dan kualitas pelayanan pendidikan di Jawa Timur”

Tujuan pendidikan Jawa Timur dinilai berhasil tercapai atau tidak diukur melalui 2 (dua) indikator utama yakni :

1. **Indeks Pendidikan**, yang merupakan gambaran tentang akses dan mutu pendidikan di Jawa Timur serta kontribusinya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, yang merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di Jawa Timur yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan dari aparatur atau lembaga penyelenggara pelayanan pendidikan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya dengan kenyataan yang diperolehnya.

Upaya-upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi tentu saja membutuhkan arah dan panduan yang jelas sehingga pengerahan

sumber daya organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk tujuan dimaksud maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menetapkan arah dan fokus pembangunan pendidikan dalam bentuk **sasaran strategis pendidikan Jawa Timur** sebagaimana termaktub dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1. Sasaran Strategis Pendidikan Jawa Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 - 18 tahun	71,23	72,14	72,76	73,26	73,76	74,26
		Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK	0,65	0,62	0,58	0,54	0,50	0,46
		Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK	98,52	98,57	98,63	98,68	98,73	98,78
		Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK	65,78	65,83	68,21	68,26	68,31	68,36
		Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas	7,05	7,14	7,23*	7,36	7,47	7,58
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	78,23	79,14	81,42	81,47	81,52	81,57
2	Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi minimal S1/D4	94,84	96,55	98,78	98,80	98,90	99,00
3	Meningkatnya mutu tata kelola	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	82	85

	/manajemen pendidikan menengah							
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2014-2019 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan Jawa Timur. Selain itu dipertimbangkan pula hasil capaian pembangunan pendidikan hingga tahun 2013. Strategi dan arah kebijakan ini juga dikembangkan dengan memperhatikan komitmen Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), Millenium Development Goals (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Jawa Timur tahun 2014-2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten/Kota, berkaitan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang menjadi penjabaran visi dan misi pembangunan di Jawa Timur. Telaah terhadap sasaran-sasaran yang dimaksud telah dirumuskan pada naskah RPJMD Jawa Timur 2014-2019, menunjukkan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, dan tata kelola.

1. Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2014-2019

Strategi memberikan gambaran tentang upaya dan langkah-langkah sistematis untuk mencapai misi pembangunan yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan. Dalam pengembangan strategi pembangunan pendidikan di Jawa Timur tahun 2014-2019 yang dilandasi oleh misi untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan, perlu dijelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-

sasaran pembangunan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. Seperti telah diungkapkan pada telaah RPJMD Jawa Timur 2014-2019 seperti yang tercantum dalam BAB III, terdapat 5 (lima) sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Kelima sasaran pembangunan pendidikan tersebut dijabarkan dari rumusan misi pembangunan pertama, yaitu: meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Strategi pembangunan pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta kualitas layanan pendidikan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan

Selama 5 (lima) tahun ke depan, strategi pembangunan pendidikan tersebut menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengambil dan memutuskan kebijakan pembangunan pendidikan. Kelima strategi pembangunan pendidikan tersebut pada dasarnya merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur, penetapannya sebagai prioritas tentu saja dipengaruhi oleh capaian pembangunan bidang pendidikan pada periode sebelumnya dan harapan ideal dunia pendidikan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang disesuaikan dan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Jawa Timur.

Bila dicermati secara mendalam, strategi pembangunan pendidikan yang pertama berkaitan erat dengan makin meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan, guna mengantisipasi perkembangan kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan persaingan dalam kehidupan masyarakat dunia. Untuk itu pencapaian pendidikan pada jenjang dasar, dirasakan kurang memadai lagi untuk mengimbangi dinamika kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan untuk menempuh pendidikan jenjang menengah menjadi suatu keniscayaan. Selain itu dengan komitmen yang tinggi terhadap kepentingan pembangunan pendidikan, program-program

bantuan pembiayaan pendidikan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diperkuat oleh program BOS Daerah (BOSDA) yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi. Program-program tersebut dalam implementasinya memerlukan pengembangan sistem pengelolaan yang memadai, agar efektivitasnya untuk tujuan wajib belajar jenjang pendidikan menengah 12 tahun dapat tercapai.

Sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi melebihi rata-rata nasional, Jawa Timur membutuhkan penyediaan sumberdaya produktif untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang terus berkembang. Untuk itu dirasakan perlunya strategi peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan kejuruan. Proporsi 70% : 30% antara Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Umum menjadi acuan dasar untuk menambah dan mengupayakan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan baru di berbagai wilayah Jawa Timur. Selain itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan, demi meningkatnya kualitas lulusan, guna menjawab kebutuhan dunia kerja yang juga terus meningkat tuntutannya atas sumberdaya yang berpengatahuan dan berketerampilan memadai.

2. Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2014-2019

Berdasarkan sasaran pembangunan pendidikan seperti tersebut di atas, dikembangkan arah kebijakan pendidikan yang akan menjadi acuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana termaktub dalam tabel

Tabel. Strategi dan Kebijakan Pendidikan Jawa Timur

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3
1	Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kompetensi guru dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk

	tenaga kependudukan serta kualitas layanan pendidikan.	<p>menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah</p> <p>3. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.</p> <p>4. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</p>
2	Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA <i>double track</i> 2. Analisa Guru dan Tenaga Kependidikan 3. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata 4. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas 5. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi 6. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta 7. Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu

Selanjutnya berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan mengembangkan program dan kegiatan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya organisasi yang ada serta jejaring kerja yang luas.

3. Program Prioritas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Sesuai dengan Program Prioritas dan Program Penunjang Pendidikan Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD 2014 - 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2018, yaitu :

- a. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) / BOSDA MADIN.

Satu terobosan besar dan nyata dalam pembangunan bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur

bersama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Timur sejak tahun 2010 adalah pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan kepada madrasah diniyah dan guru swasta.

Latar belakang pelaksanaan program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) ini antara lain adalah karena masih banyaknya peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terutama setelah mereka lulus pendidikan SD/MI atau yang sederajat dan adanya kesenjangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dikarenakan kesulitan faktor ekonomi, geografi, demografi, gender, sosial budaya dan lain-lain.

Landasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemberian bantuan ini adalah Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga tanpa membedakan kaya miskin, sekolah negeri /swasta, sekolah kota/sekolah pinggiran, sekolah umum/sekolah keagamaan dan lain - lain sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang murah dan bermutu bagi rakyatnya.

Oleh karena itu sejak tahun 2010 hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur menyusun kebijakan dan program untuk memberikan bantuan keuangan kepada santri/warga belajar/ siswa Madrasah Diniyah Ula/Wustho.

Tujuan pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan kepada madrasah diniyah dan guru swasta ini adalah :

- a. Mencegah siswa putus sekolah pada jenjang Diniyah Ula dan Diniyah Wustho, Paket A dan B di Provinsi Jawa Timur;
- b. Membantu siswa yang mengalami kesulitan memperoleh layanan pendidikan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografi, maupun alasan sosial budaya lainnya;
- c. Membantu siswa untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
- d. Meningkatkan kualitas pembelajaran;

- e. Meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja tenaga pendidik dengan memberikan tunjangan kepada guru swasta yang mengajar di SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula dan di SMP/MTS/SMPLB/Salafiyah Wustho/SMP Satu Atap.
- f. Dalam jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur.

Sasaran program pemberian bantuan keuangan untuk madrasah diniyah dan guru swasta ini adalah :

1. Santri/warga belajar/siswa Madrasah Diniyah Ula, Paket A dan Paket A Pondok Pesantren dengan nilai bantuan sebesar Rp 15.000,-/siswa/bulan;
2. Santri/warga belajar/siswa Madrasah Diniyah Wustho, Paket B, dan Paket B Pondok Pesantren dengan nilai bantuan sebesar Rp 25.000,-/siswa/bulan;
3. Pengasuh/ustadz/guru Madrasah Diniyah Ula/Wustho dengan nilai bantuan sebesar Rp 300.000,-/guru/bulan;
4. Guru swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho dan SMP Satu Atap dengan nilai bantuan sebesar Rp 300.000,-/guru/bulan.

Karena besarnya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program pemberian bantuan keuangan kepada madrasah diniyah dan guru swasta ini, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran BPPDGS sebesar 50% dari kebutuhan di kab/kota dan disalurkan untuk 6 (enam) bulan pada tahun 2018, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur mengalokasikan anggaran BPPDGS sebesar 50% dari kebutuhan di kab/kota dan disalurkan untuk 6 (enam) bulan pada tahun 2018 atau sesuai kemampuan anggaran di kab/kota.

Kesepakatan Bersama untuk memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan kepada madrasah diniyah dan guru swasta antara Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur telah ditandatangani pada tanggal 18 Nopember 2009.

Melihat kondisi sosial budaya Provinsi Jawa Timur, mudah – mudahan dengan adanya program ini diharapkan peningkatan

perluasan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan dapat tercapai khususnya bagi santri/siswa madrasah diniyah ula dan wustho.

b. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK

Dalam pembangunan/pengembangan pendidikan kejuruan (SMK) di Jawa Timur ke depan berorientasi pada perluasan akses pendidikan SMK dengan target tercapainya rasio siswa SMA : SMK pada 2019 sebesar 30 : 70 (dan akan ditingkatkan lagi rasio siswa SMK pada tahun - tahun berikutnya) dan pada pelaksanaan Program Kewirausahaan SMK.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain ; pada tahun 2018 pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMK, Pembangunan USB SMK ini didasarkan atas potensi, ciri khas dan kebutuhan daerah dalam usaha untuk ikut menyediakan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pengembangan masing - masing daerah.

c. Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan

Satu hal yang juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi saat ini adalah banyaknya gedung sekolah yang dalam kondisi rusak berat. Untuk itu Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan rehabilitasi gedung sekolah dan bantuan sarana / prasarana pendidikan. Ini belum termasuk anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

PROGRAM KERJA TAHUN 2018

Orientasi pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur direpresentasikan ke dalam pengarusutamaan berbagai variabel dan aspek pembangunan yang akan memberi corak seluruh program pembangunan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Timur juga harus merepresentasikan kebutuhan dan target pembangunan di Jawa Timur secara menyeluruh.

Kebijakan yang melandasi pembangunan pendidikan di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jenjang Pendidikan SMA/ SMK dan PK-PLK, pemberian bantuan imbal swadaya, menekan angka putus sekolah melalui penyediaan beasiswa dengan mengupayakan penerima beasiswa perempuan secara lebih proporsional untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam mendapatkan kesempatan pendidikan;
2. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi serta mengupayakan bantuan pendidikan serta subsidi lainnya dalam rangka menjamin perluasan kesempatan belajar serta peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan akuntabilitasnya kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan pendidikan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antara sekolah umum dan kejuruan.
4. Mengupayakan tambahan ruang kelas baru dan unit sekolah baru termasuk penyediaan guru secara selektif, rehabilitasi dan revitalisasi bangunan sekolah, serta penambahan ruang fungsional (perpustakaan ruang olahraga ruang laboratorium) yang dilengkapi dengan sarana/peralatan pendukungnya;
5. Mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan reguler, khususnya bagi anak berbakat, masyarakat miskin, masyarakat berpindah-pindah, anak

jalan, masyarakat terpencil, masyarakat di daerah bermasalah dan pengungsi dengan menyelenggarakan pendidikan khusus Meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya pendidikan bagi anak, serta melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak yang masih berada di luar sistem sekolah, akibat faktor kemiskinan dengan tetap memberikan perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender;

6. Mengembangkan sekolah berkawasan lokal untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan sekolah reguler menjadi sekolah berstandar nasional atau sekolah yang memiliki keunggulan khusus.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah tercantum tugas dan tanggung jawab Bidang, Sekretariat dan, UPT Dinas dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan, maka kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Timur harus didukung oleh seluruh elemen aparat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membidangi masalah pendidikan.

Untuk itu dalam menyusun Program Kerja juga harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing bidang, UPT dan Cabang Dinas terkait. Program Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ruang lingkup dan jangkauan kegiatan tahun 2018 yang akan dilaksanakan setiap unit kerja sesuai rencana. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta dapat meningkatkan peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing Bidang, Sekretariat, UPT Dinas dan Cabang Dinas terhadap tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam pokok-pokok program, maka perlu sasaran program yang cukup efektif dan efisien sesuai dengan tupoksi.

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)
6. Program Pendidikan Menengah Atas
7. Program Pendidikan Menengah Kejuruan
8. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di 31 Cabang Dinas
10. Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
11. Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan
12. Program Pengembangan dan peningkatan mutu Kompetensi Guru dan Siswa SMK
13. Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik

**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH JAWA TIMUR**

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	1.01.0100	Dinas Pendidikan				1.756.000.000.000
	1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor		85 %	14.944.215.807
1	1.01.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Kota Surabaya	100 %	14.944.215.807
	1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		100 %	19.413.197.540

2	1.01.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	Kota Surabaya	100% Paket/Unit	12.922.360.440
3	1.01.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	Kota Surabaya	100% Paket/Unit	6.490.837.100
	1.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi		100 %	14.072.112.670
4	1.01.07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	Jawa Timur	15 kali	7.998.978.570
5	1.01.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal; Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	Jawa Timur, Luar Provinsi	20 pegawai ,200 pegawai	6.073.134.100
	1.01.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		100 %	5.457.414.000

6	1.01.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jawa Timur	4 dokumen	2.225.000.000
7	1.01.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	Jawa Timur	1 dokumen	1.100.334.000
8	1.01.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	Jawa Timur	7 Paket	2.107.080.000
9	1.01.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Kota Surabaya	1 Dokumen	25.000.000
	1.01.32	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan		55 %	37.999.808.893
10	1.01.32.002	Mutu Sarana dan Prasarana PK - PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan sarana prasarana	Jawa Timur	60 lembaga	1.796.298.000
11	1.01.32.005	Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus	Jumlah siswa pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan operasional sekolah	Jawa Timur	19170 siswa	17.751.160.000

12	1.01.32.008	Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK-PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang memenuhi standar akreditasi	Jawa Timur	110 lembaga	3.625.296.209
13	1.01.32.014	Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah Guru PK/MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD (Focus Group Discussion) dalam peningkatan mutu/pelayanan pendidikan khusus dan inklusif; Jumlah Guru MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD (Focus Group Discussion) dalam peningkatan mutu/pelayanan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terpececil dan Terbelakang)	Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo	1378 org; 228 orang	5.602.054.684
14	1.01.32.016	Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo	Jumlah peserta didik yang memiliki bakat istimewa untuk menjadi olahragawan yang berprestasi tingkat	Kabupaten Sidoarjo	183 siswa	9.225.000.000

			regional, nasional, internasional			
	1.01.33	Program Pendidikan Menengah Atas	APM SMA		34,69 %	659.780.000.000
15	1.01.33.001	Mutu sarana dan prasarana SMA	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana, prasarana dan media pembelajaran	Jawa Timur	1280 orang	21.446.600.000
16	1.01.33.002	Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA	Jumlah guru untuk pemenuhan 8 standart nasional pendidikan SMA; Prosentase sekolah pelaksana UNBK SMA; Jumlah sekolah yang menyelenggarakan K13; Jumlah siswa yang mendapatkan pembelajaran dan pelatihan yang bermutu	Jawa Timur	16885 Orang;100 persen;580 Lembaga;12 64 Siswa	54.220.800.000
17	1.01.33.008	Manajemen Pendidikan SMA	Jumlah Kepsek dan Guru Pendidikan SMA yang ditingkatkan kualitas manajerialnya	Jawa Timur	4574 Orang	11.862.600.000

18	1.01.33.009	Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMA	Jumlah siswa yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Atas	Jawa Timur	323571 Siswa	453.000.000.000
19	1.01.33.010	Penyelenggaraan Bidik Misi SMA	Jumlah Calon Siswa SMA yang berprestasi dan mengalami kendala Ekonomi	Jawa Timur	43 Orang	0
20	1.01.33.011	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Atas (DAK)	Jumlah lembaga sekolah Pendidikan Menengah Umum yang mendapatkan Bantuan Sarana Prasarana	Jawa Timur	908 Lembaga	104.000.000.000
21	1.01.33.012	Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMA	Jumlah siswa SMA Miskin di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan bantuan	Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto	19099 Siswa	15.250.000.000
	1.01.34	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	APM SMK		33,70 %	871.071.100.000
22	1.01.34.001	Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK	Jumlah peserta kegiatan yang dikembangkan dan diselaraskan kualitas pendidikan SMK dengan Industri	Jawa Timur	6.518 orang	18.864.127.000

23	1.01.34.009	Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah	Jawa Timur	732.384 siswa	465.000.000.000
24	1.01.34.010	Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Pendidikan SMK	Jumlah siswa miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan di SMK	Jawa Timur, Kabupaten Pacitan	34.100 Siswa	14.520.500.000
25	1.01.34.012	Penyelenggaraan Bidik Misi Pendidikan SMK	Jumlah calon siswa SMK yang berprestasi dan mengalami kendala ekonomi	Jawa Timur	42 siswa	0
26	1.01.34.013	Mutu Sarana dan Prasarana SMK	Jumlah lembaga yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang di SMK	Jawa Timur	100 Lembaga	168.848.216.000
27	1.01.34.014	Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik Smk	Jumlah siswa SMK bersertifikasi kompetensi yang terserap di dunia Usaha dan dunia Industri ; Jumlah Lembaga SMK yang berstandar LSP	Jawa Timur	20.702 Siswa;228 Lembaga	14.495.157.000
28	1.01.34.016	Manajemen Kelembagaan SMK Mini	Jumlah tenaga terampil yang ada di SMK Mini	Jawa Timur	55000 orang	732.700.000
29	1.01.34.017	Penyelenggaraan DAK Pendidikan SMK	Jumlah lembaga SMK yang mendapatkan bantuan DAK untuk	Jawa Timur	515 lembaga	188.610.400.000

			pemenuhan sarana prasarana			
	1.01.35	Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan TIK dalam proses belajar mengajar		7.2 %	8.302.200.000
30	1.01.35.001	Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui TIK Pendidikan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan TIK dalam pengembangan pendidikan	Jawa Timur	250 lembaga	0
31	1.01.35.002	Penyelenggaraan Metode Belajar Mengajar Menggunakan TIK	Jumlah Guru yang memanfaatkan TIK dalam pengembangan metode pembelajaran	Jawa Timur	1784 orang	2.310.972.000
32	1.01.35.003	Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan	Jumlah Guru yang akses penyebaran dan pemanfaatan TIK Pendidikan	Jawa Timur	3100 guru	5.391.228.000
33	1.01.35.004	Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP)	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT TIKP	Kota Surabaya	5 paket	600.000.000
	1.01.36	Program Pengembangan dan peningkatan mutu	Persentase guru dan siswa SMK yang lulus uji kompetensi keahlian		20 %	8.370.000.000

		Kompetensi Guru dan Siswa SMK				
34	1.01.36.001	Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPK)	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT PPK	Jawa Timur	12 Paket	990.240.000
35	1.01.36.002	Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan di UPT PPK	Jumlah materi pelatihan dan materi uji kompetensi di UPT PPK yang disusun dan dievaluasi	Jawa Timur	60 Materi	563.410.000
36	1.01.36.008	Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan di UPT PPK untuk Guru dan Siswa SMK	Jumlah Guru /Siswa SMK di Jawa Timur yang meningkat dan lulus uji kompetensinya	Jawa Timur	8400 Orang	6.816.350.000
	1.01.37	Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik	Persentase siswa yang berprestasi		20 %	5.750.000.000
37	1.01.37.007	Penyelenggaraan Mutu Prestasi Akademik	Jumlah siswa didik yang mengikuti lomba prestasi akademik	Kota Surabaya	1600 orang	1.750.000.000
38	1.01.37.008	Penyelenggaraan Mutu Prestasi Non Akademik	Jumlah siswa didik yang mengikuti lomba prestasi Non Akademik	Kota Surabaya	6976 siswa	3.250.000.000

40	1.01.37.010	Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Bina Prestasi Peserta Didik	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT Bina Prestasi Peserta Didik	Kota Surabaya	5 paket	750.000.000
	1.01.38	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Surabaya	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Surabaya		98,16	1.370.600.000
41	1.01.38.001	Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah Surabaya	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kota Surabaya	100 Persen	1.070.600.000
42	1.01.38.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya	Kota Surabaya	5 paket	300.000.000
	1.01.39	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Gresik		71,73	1.244.100.000
43	1.01.39.001	Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Gresik	100 Persen	944.100.000

		dan PK-PLK Wilayah Gresik				
44	1.01.39.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik	Kabupaten Gresik	5 paket	300.000.000
	1.01.40	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Sidoarjo		80,67	1.271.600.000
45	1.01.40.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Sidoarjo	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Sidoarjo	100 persen	971.600.000
46	1.01.40.003	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	5 paket	300.000.000
	1.01.41	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Mojokerto		72,19	1.475.100.000

47	1.01.41.001	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto	Kabupaten Mojokerto	5 paket	300.000.000
48	1.01.41.002	Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah Mojokerto	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Mojokerto	100 persen	1.175.100.000
	1.01.42	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Jombang		80,78	1.244.100.000
49	1.01.42.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Jombang	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Jombang	100 persen	944.100.000
50	1.01.42.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang	Kabupaten Jombang	5 paket	300.000.000

	1.01.43	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Malang	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Malang		60,85	1.447.600.000
51	1.01.43.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Malang	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Malang	100 persen	1.147.600.000
52	1.01.43.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang	Kabupaten Malang	5 paket	300.000.000
	1.01.44	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Batu	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Batu		90,77	1.359.600.000
53	1.01.44.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Batu	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kota Malang, Kota Batu	100 persen	1.059.600.000
54	1.01.44.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas	Kota Malang, Kota Batu	5 paket	300.000.000

		Kota Batu - Kota Malang	Pendidikan Wilayah Batu-Kota Malang			
	1.01.45	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Bojonegoro		73,30	1.403.600.000
55	1.01.45.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Bojonegoro	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Bojonegoro	100 persen	1.103.600.000
56	1.01.45.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	5 paket	300.000.000
	1.01.46	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tuban	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Tuban		59,45	1.299.100.000
57	1.01.46.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Tuban	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Tuban	100 persen	999.100.000

58	1.01.46.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tuban	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tuban	Kabupaten Tuban	5 paket	300.000.000
	1.01.47	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Lamongan		75,17	1.447.600.000
59	1.01.47.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Lamongan	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Lamongan	100 persen	1.147.600.000
60	1.01.47.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan	Kabupaten Lamongan	5 paket	300.000.000
	1.01.48	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Madiun		66,46	1.321.100.000
61	1.01.48.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK	Kabupaten Madiun	100 persen	1.021.100.000

		dan PK-PLK di wilayah Madiun	yang mendapatkan bimbingan teknis			
62	1.01.48.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun	Kabupaten Madiun	5 paket	300.000.000
	1.01.49	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ngawi	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Ngawi		64,33	1.458.600.000
63	1.01.49.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Ngawi	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Ngawi	100 Persen	1.158.600.000
64	1.01.49.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ngawi	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ngawi	Kabupaten Ngawi	5 paket	300.000.000
	1.01.50	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Magetan	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Magetan		82,55	1.123.100.000

65	1.01.50.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Magetan	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Magetan	100 persen	823.100.000
66	1.01.50.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Magetan	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Magetan	Kabupaten Magetan	5 paket	300.000.000
	1.01.51	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Ponorogo		75,00	1.134.100.000
67	1.01.51.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Ponorogo	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Ponorogo	100 Persen	834.100.000
68	1.01.51.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	5 paket	300.000.000

	1.01.52	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Pacitan		60,86	1.238.600.000
69	1.01.52.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Pacitan	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Pacitan	100 Persen	938.600.000
70	1.01.52.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pacitan	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pacitan	Kabupaten Pacitan	5 paket	300.000.000
	1.01.53	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Kediri		73,34	1.332.100.000
71	1.01.53.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Kediri	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Kediri, Kota Kediri	100 Persen	1.032.100.000
72	1.01.53.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas	Kabupaten Kediri, Kota Kediri	5 paket	300.000.000

		Pendidikan Wilayah Kediri	Pendidikan Wilayah Kediri			
	1.01.54	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Nganjuk		64,79	1.156.100.000
73	1.01.54.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Nganjuk	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Nganjuk	100 Persen	856.100.000
74	1.01.54.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	5 paket	300.000.000
	1.01.55	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Blitar		67,09	1.161.600.000
75	1.01.55.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Blitar	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Blitar	100 Persen	861.600.000

76	1.01.55.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar	Kabupaten Blitar	5 paket	300.000.000
	1.01.56	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Tulungagung		59,21	1.139.600.000
77	1.01.56.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Tulungagung	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Tulungagung	100 Persen	839.600.000
78	1.01.56.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	5 paket	300.000.000
	1.01.57	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Trenggalek	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Trenggalek		59,78	1.123.100.000
79	1.01.57.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK	Kabupaten Trenggalek	100 Persen	823.100.000

		dan PK-PLK di wilayah Trenggalek	yang mendapatkan bimbingan teknis			
80	1.01.57.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Trenggalek	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	5 paket	300.000.000
	1.01.58	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Pasuruan		76,22	1.321.100.000
81	1.01.58.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Pasuruan	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Pasuruan	100 Persen	1.021.100.000
82	1.01.58.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	5 paket	300.000.000
	1.01.59	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Probolinggo		54,93	1.326.600.000

83	1.01.59.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Probolinggo	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Probolinggo	100 persen	1.026.600.000
84	1.01.59.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	5 paket	300.000.000
	1.01.60	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lumajang	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Lumajang		56,04	1.139.600.000
85	1.01.60.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Lumajang	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Lumajang	100 Persen	839.600.000
86	1.01.60.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lumajang	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lumajang	Kabupaten Lumajang	5 paket	300.000.000

	1.01.61	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Jember		59,33	1.178.100.000
87	1.01.61.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Jember	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Jember	100 Persen	878.100.000
88	1.01.61.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember	Kabupaten Jember	5 paket	300.000.000
	1.01.62	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Bondowoso		49,82	1.205.600.000
89	1.01.62.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Bondowoso	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Bondowoso	100 Persen	905.600.000
90	1.01.62.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas	Kabupaten Bondowoso	5 paket	300.000.000

		Pendidikan Wilayah Bondowoso	Pendidikan Wilayah Bondowoso			
	1.01.63	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Situbondo	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Situbondo		50,78	1.101.100.000
91	1.01.63.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Situbondo	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Situbondo	100 Persen	801.100.000
92	1.01.63.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Situbondo	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Situbondo	Kabupaten Situbondo	5 paket	300.000.000
	1.01.64	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Banyuwangi		71,49	1.205.600.000
93	1.01.64.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Banyuwangi	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Banyuwangi	100 Persen	905.600.000

94	1.01.64.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	5 paket	300.000.000
	1.01.65	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Bangkalan		51,04	1.139.600.000
95	1.01.65.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Bangkalan	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Bangkalan	100 Persen	839.600.000
96	1.01.65.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangkalan	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	5 paket	300.000.000
	1.01.66	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Sampang		39,07	1.123.100.000
97	1.01.66.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK	Kabupaten Sampang	100 Persen	823.100.000

		dan PK-PLK di wilayah Sampang	yang mendapatkan bimbingan teknis			
98	1.01.66.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang	Kabupaten Sampang	5 paket	300.000.000
	1.01.67	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Pamekasan		60,80	1.112.100.000
99	1.01.67.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Pamekasan	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Pamekasan	100 Persen	812.100.000
100	1.01.67.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pamekasan	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	5 paket	300.000.000
	1.01.68	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep	APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Sumenep		59,68	1.101.100.000

101	1.01.68.001	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah Sumenep	Persentase Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis	Kabupaten Sumenep	100 Persen	801.100.000
102	1.01.68.002	Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep	Kabupaten Sumenep	5 paket	300.000.000
	1.01.69	Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Prosentase bantuan yang disalurkan tepat waktu		100 %	7.737.746.000
106	1.01.69.005	Manajemen BOS Pendidikan	Jumlah peserta kegiatan koordinasi pengelolaan BOS Dikdas	Jawa Timur	210 orang	440.000.000
108	1.01.69.007	Penyelenggaraan Manajemen Bantuan Pendidikan	Jumlah penerima bantuan pendidikan	Jawa Timur	1099248 orang	7.297.746.000
	1.01.70	Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi S1/D4 atau setara		98%	64.397.605.090
109	1.01.70.005	Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan	Jawa Timur	7680 Orang	32.053.500.000

			kesejahteraan dan motivasi pengabdianya			
110	1.01.70.006	Pendidikan Lanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2 sesuai dengan kompetensinya	Jawa Timur, Kabupaten Madiun	70 Orang	5.600.000.000
111	1.01.70.007	Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan SDM dan Kinerjanya	Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro	1881 Orang	5.405.000.000
112	1.01.70.008	Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang terpilih berprestasi dan berdedikasi	Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto	1419 Orang	6.205.000.090
113	1.01.70.009	Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kualitas sesuai dengan	Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten	30000 Orang	15.134.105.000

			prestasi yang dicapai dan standart kinerja	en Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun		
--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Program Kerja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 baik dalam bentuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan serta peraturan dan kebijakan Pendidikan Nasional yang melandasi kegiatan operasional baik dari Pusat maupun dari Propinsi.

Penyusunan Program Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan sesuai rencana pada tahun 2018 dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Karena Program Kerja ini menyangkut semua elemen yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maka masukan dan saran sangat dibutuhkan untuk penyusunan Program Kerja di masa mendatang agar lebih meningkat. Semoga Program Kerja ini dapat memberikan nilai tambah serta mendorong peningkatan aktifitas dan profesionalisme kerja.